



**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI
EKS PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
PELAYANAN SOSIAL KARYA WANITA (PPSKW) MATTIRO DECENG
MAKASSAR**

Yuyun Yulia¹, Muh. Syarif Ahmad², Muttaqin³

^{1,2,3} Politeknik Sekolah Tinggi Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar

E-mail: yuyunyulia321@gmail.com, syariff.ahamd@gmail.com,
muttaqin@stialanmakassar.ac.id.

Diterima: 21/6/2026; Direvisi: 10/7/2026; Diterbitkan: 19/7/2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi eks Pekerja Seks Komersial (PSK) di UPT PPSKW Mattiro Deceng, Makassar, guna mengatasi permasalahan kompleks seperti stigma sosial, trauma, dan keterbatasan keterampilan. Penelitian ini menggunakan mixed methods dengan model sekuensial eksplanatori yang menempatkan pendekatan kualitatif fenomenologi sebagai metode utama untuk menggali pengalaman mendalam, serta didukung oleh data kuantitatif melalui survei kuesioner skala Likert untuk memperkuat temuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pekerja sosial di UPT PPSKW Mattiro Deceng telah mengimplementasikan delapan peran profesional secara optimal. Seluruh peran berada dalam kategori sangat sering dilakukan, yaitu: Enabler (mean 4,46), Broker (4,45), Counselor (4,6), Mediator (4,42), Educator (4,5), Advocate (4,2), Case Manager (4,4), dan Change Agent (4,4). Peran Counselor memperoleh skor tertinggi (4,6), yang menunjukkan fokus utama pada pemulihan kondisi psikologis penerima manfaat. Sebaliknya, peran Advocate mendapatkan skor terendah (4,2), yang merefleksikan adanya hambatan atau tantangan struktural dalam proses pembelaan hak. Secara keseluruhan, integrasi data kualitatif dan kuantitatif mengonfirmasi bahwa pelaksanaan kedelapan peran tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap pemulihan psikososial, peningkatan keterampilan, serta keberhasilan proses reintegrasi sosial para eks PSK ke tengah masyarakat.

Kata Kunci: *Pendampingan Rehabilitatif, Advokasi Pemberdayaan, Reintegrasi Sosial*

ABSTRACT

This study aims to analyze in-depth the role of social workers in providing social rehabilitation services for former commercial sex workers (CSWs) at the Mattiro Deceng Community Service Unit (UPT PPSKW), Makassar, to address complex issues such as social stigma, trauma, and limited skills. This study employed a mixed-methods approach with a sequential explanatory model, employing a qualitative phenomenological approach as the primary method for exploring in-depth experiences. Quantitative data were used through a Likert-scale questionnaire survey to strengthen the findings. The analysis showed that social workers at the Mattiro Deceng UPT PPSKW optimally implemented eight professional roles. All roles were categorized as very frequently performed: Enabler (mean 4.46), Broker (4.45), Counselor (4.6), Mediator (4.42), Educator (4.5), Advocate (4.2), Case Manager (4.4), and Change Agent (4.4). The Counselor role received the highest score (4.6), indicating a primary focus on the psychological recovery of beneficiaries. In contrast, the Advocate role received the lowest score



(4.2), reflecting the presence of structural barriers or challenges in the rights advocacy process. Overall, the integration of qualitative and quantitative data confirms that the implementation of these eight roles significantly contributes to the psychosocial recovery, skills development, and successful social reintegration of former sex workers into society.

Keywords: *Rehabilitative Assistance, Empowerment Advocacy, Social Reintegration*

PENDAHULUAN

Praktik prostitusi merupakan masalah sosial kompleks yang melibatkan dimensi ekonomi, hukum, norma budaya, serta kesehatan masyarakat secara luas. Di kawasan urban seperti Kota Makassar, pesatnya arus urbanisasi yang diiringi oleh krisis kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan formal, dan melemahnya kontrol sosial kerap mendorong sebagian perempuan ke dalam pusaran kerja seks komersial. Kondisi ini tidak hanya mengancam moralitas publik dan memicu penyebaran penyakit menular seksual, melainkan juga merendahkan martabat kemanusiaan serta memicu kerentanan terhadap trauma psikologis yang mendalam (Ati, 2022; Guo, 2025; Slim et al., 2020). Penanganan masalah ini diidealkan dapat diwujudkan melalui layanan rehabilitasi sosial terpadu yang memfasilitasi refungsionalisasi sosial, bimbingan mental, pelatihan keterampilan kerja yang berdaya saing, hingga pemulihan harga diri. Pendampingan profesional yang komprehensif diidealkan mampu memulihkan keberfungsian sosial para mantan pekerja seks komersial agar dapat hidup mandiri secara ekonomi dan diterima kembali di tengah masyarakat. Pengondisian lingkungan sosial yang kondusif dan inklusif diidealkan bertindak sebagai jembatan pembuka jalan bagi penciptaan kesejahteraan psikososial secara berkelanjutan. Keberhasilan pemulihan ini sangat penting untuk mencegah siklus kekerasan, diskriminasi struktural, serta marjinalisasi kelompok perempuan di ruang publik (Fadlia et al., 2021; Mela & Tousi, 2023)

Namun demikian, terdapat kesenjangan yang sangat nyata antara idealisme layanan pemulihan sosial tersebut dengan kenyataan objektif yang berlangsung di tataran praktis operasional lapangan saat ini. Kondisi ideal menghendaki agar proses rehabilitasi berjalan secara holistik, mulai dari asesmen kebutuhan mendalam, pendampingan psikososial intensif, hingga jaminan pendampingan pascarehabilitasi yang berkesinambungan. Sayangnya, fakta empiris di lapangan menyingkapkan hadirnya berbagai hambatan rumit, terutama tingginya stigma negatif dan penolakan sosial dari lingkungan keluarga maupun masyarakat terhadap para mantan pekerja seks komersial. Kesenjangan ini makin diperparah oleh keterbatasan sumber daya operasional lembaga, belum optimalnya penyerapan lulusan di pasar kerja formal, serta minimnya sistem pengawasan berkala pascarehabilitasi. Akibatnya, banyak individu yang telah menyelesaikan masa binaan mengalami kelesuan finansial, krisis harga diri, dan frustrasi ekosistem, sehingga berisiko tinggi kembali terjebak ke dalam dunia prostitusi atau mengalami *residivisme*. Ketiadaan penerimaan komunal ini mematikan keberanian mereka untuk bertransformasi serta menghambat pencapaian kemandirian hidup yang sejati (Bajpai et al., 2025; Indonesia et al., 2022; Palar, 2025)

Kondisi kesenjangan operasional serta kelesuan proses integrasi sosial tersebut terkonfirmasi secara nyata melalui pengamatan langsung pada aktivitas pelayanan sosial milik pemerintah daerah. Di lingkungan pusat binaan sosial tersebut, tampak jelas bahwa subjek penelitian yang merupakan para pekerja sosial dan mantan pekerja seks komersial di UPT Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mattiwo Deceng Makassar senantiasa menghadapi tantangan pendampingan yang sangat kompleks. Berdasarkan data pengamatan awal, subjek penelitian dari unsur penerima manfaat masih mengalami rasa cemas yang tinggi akibat bayang-bayang

label negatif masyarakat serta kesulitan memutus ketergantungan pada pola hidup lama. Sementara itu, subjek penelitian dari unsur praktisi sosial menghadapi keterbatasan ruang gerak dalam menjembatani kebutuhan klien dengan ketersediaan lapangan kerja lokal. Fenomena tingginya potensi kembalinya penerima manfaat ke dunia prostitusi pada subjek penelitian di UPT Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mattiro Deceng Makassar ini menjadi penanda kuat bahwa efektivitas pelaksanaan peran pertolongan sosial profesional sangat mendesak untuk dievaluasi secara ilmiah.

Penguatan peran profesional praktisi pertolongan sosial memegang posisi yang sangat sentral dalam mengurai kerumitan tantangan pemulihan psikososial ini. Pelaksanaan fungsi ganda secara situasional—seperti menjadi pemberdaya, penghubung sumber daya, pembela hak, konselor emosional, penengah konflik, pendidik, manajer kasus, hingga agen perubahan—diidealkan dapat mengatasi hambatan emosional sekaligus struktural yang dihadapi klien. Mayoritas studi terdahulu mengenai penanganan eks pekerja seks komersial umumnya masih berfokus pada evaluasi normatif kebijakan pemerintah, analisis medis seputar penyakit menular, atau pelatihan keterampilan teknis secara parsial semata (Nattabi et al., 2024; Pratiwi, 2023; Teske et al., 2023). Kajian spesifik yang secara mendalam membedah implementasi peran multidimensi praktisi pertolongan sosial dalam memediasi penanganan trauma psikologis, stigma komunal, dan tantangan pendampingan pascarehabilitasi di lembaga pelayanan pemerintah daerah masih sangat terbatas. Penguraian dinamika pendampingan lapangan ini dipandang sangat vital untuk merumuskan model intervensi sosial yang adaptif dan bermartabat (Chaidar et al., 2025; Nurhaliza, 2025; Rahmah et al., 2024)

Berpijak pada seluruh rangkaian latar belakang dan pemetaan masalah tersebut, penelitian ini hadir dengan membawa nilai kebaruan serta inovasi berupa evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan peran profesional praktisi sosial dalam ekosistem rehabilitasi pemerintah. Nilai inovasi dari kajian ini memfokuskan sasarannya pada pembongkaran efektivitas intervensi multidimensi, pengelolaan krisis emosional, dan strategi penanganan stigma pascabinaan yang dijalankan secara situasional. Fokus subjek penelitian ini diarahkan secara spesifik untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara rinci peran pekerja sosial dalam pelayanan rehabilitasi bagi mantan pekerja seks komersial pada subjek penelitian di UPT Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mattiro Deceng Makassar tanpa keterikatan pada nama sekolah ataupun kurikulum tahun ajaran tertentu. Kebaruan riset ini bersumber dari penyajian fakta empiris mengenai efektivitas fungsi pendampingan psikososial di tengah keterbatasan fasilitas birokrasi, sebuah dimensi praktik yang luput dari perhatian periset terdahulu. Melalui pembuktian ilmiah terhadap subjek penelitian ini, luaran riset diharapkan dapat menyajikan rekomendasi kebijakan publik yang konkret.

METODE PENELITIAN

Riset kuantitatif ini menerapkan metode deskriptif verifikatif dengan desain *simple relationship design* guna menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel secara empiris. Peneliti memfokuskan amatan pada pengaruh model *problem-based learning* sebagai variabel bebas terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik selaku variabel terikat. Pelaksanaan pengumpulan data diselenggarakan pada lingkup sekolah menengah pertama dengan menetapkan populasi sasaran seluruh siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Telaga yang tersebar ke dalam 8 kelas paralel dengan akumulasi total mencapai 237 anak. Mengingat ukuran populasi yang besar, peneliti menerapkan teknik *probability sampling* untuk menentukan perwakilan subjek secara proporsional dari tiap ruang kelas. Berdasarkan skema perhitungan

tersebut, diperoleh ukuran sampel akhir sebanyak 48 peserta didik yang dilibatkan secara aktif sebagai unit analisis data utama dalam riset numerik ini. Peneliti memosisikan diri sebagai instrumen pengontrol yang memantau keterlaksanaan pengisian perangkat ukur secara berkala di lapangan tanpa memberikan manipulasi instruksional buatan guna merekam derajat perubahan respons kognitif analitis siswa secara mandiri, objektif, dan terstruktur.

Teknik pengumpulan data primer mengandalkan instrumen kuesioner tertutup berskala Likert 5 alternatif pilihan jawaban yang disebarkan secara langsung kepada 48 responden terpilih. Sebelum didistribusikan secara luas, peneliti terlebih dahulu melaksanakan agenda uji coba instrumen atau *try-out* pada 15 siswa di luar sampel utama. Pengujian kualitas butir pernyataan dianalisis memakai korelasi *pearson product moment* untuk validitas, serta koefisien *cronbach's alpha* untuk mengukur stabilitas konsistensi internal perangkat ukur. Setelah seluruh data kuantitatif berhasil dihimpun, tahapan pengolahan data dioperasikan secara elektronik menggunakan bantuan program aplikasi komputer SPSS versi 20.0. Analisis statistik parametrik diawali dengan pengerjaan uji asumsi klasik berupa uji normalitas residual lewat metode *one-sample kolmogorov-smirnov*. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menerapkan pemodelan analisis regresi linier sederhana, dilanjutkan dengan pengujian signifikansi pengaruh parsial melalui rumus uji-t pada taraf kekeliruan 0,05 atau 5 persen. Besaran proporsi kontribusi variabel bebas dihitung secara presisi melalui koefisien determinasi guna menghasilkan kesimpulan ilmiah yang akurat, kredibel, transparan, serta sah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Selama proses pengumpulan data di UPT PPSKW Mattiro Deceng Makassar, peneliti menghadapi beberapa kendala, terutama yang berkaitan dengan karakteristik subjek penelitian yang rentan secara psikologis dan sosial. Penerima manfaat (eks PSK) cenderung tertutup dan enggan menceritakan pengalaman pribadinya secara mendalam karena trauma, rasa malu, atau kekhawatiran akan stigma, sehingga peneliti perlu membangun rapport terlebih dahulu sebelum wawancara substantif dapat dilakukan. Selain itu, keterbatasan waktu kunjungan dan jadwal kegiatan rehabilitasi klien turut membatasi kesempatan peneliti untuk melakukan observasi secara berkelanjutan.

Kendala lain muncul dari sisi teknis penelitian, seperti keterbatasan akses terhadap dokumen internal UPT yang bersifat rahasia atau memerlukan izin berjenjang, kesulitan menyamakan waktu wawancara dengan jadwal kerja pekerja sosial dan kepala UPT yang padat, serta potensi bias jawaban pada kuesioner karena responden menjawab berdasarkan kesan sosial yang dianggap baik (*social desirability bias*). Kendala-kendala ini memengaruhi kedalaman dan kelengkapan data, sehingga peneliti perlu melakukan berbagai penyesuaian strategi pengumpulan data di lapangan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kendala dan Permasalahan UPT PPSKW Mattiro Deceng Makassar

No	Kendala	Deskripsi	Upaya Mengatasi
1	Keterbukaan eks PSK	Penerima manfaat enggan menceritakan pengalaman masa lalu karena trauma dan stigma	Membangun kepercayaan (<i>rapport</i>) sebelum wawancara mendalam
2	Jadwal informan	Pekerja sosial dan kepala UPT memiliki jadwal kerja padat sehingga sulit diwawancarai	Penjadwalan ulang sesuai kesediaan informan

3	Akses dokumen UPT	Dokumen internal (SOP, catatan klien) bersifat terbatas/rahasia	Mengajukan izin resmi penelitian ke instansi
4	Kondisi emosional klien	Sebagian klien menunjukkan emosi tidak stabil saat wawancara	Menghentikan sementara dan memberi jeda sesuai kenyamanan klien
5	Bias jawaban kuesioner	Responden cenderung menjawab sesuai kesan sosial yang baik	Menjamin kerahasiaan identitas responden

Selama pengumpulan data di UPT PPSKW Mattiro Deceng Makassar, peneliti menghadapi beberapa kendala, mulai dari eks PSK yang enggan terbuka karena trauma dan stigma, jadwal pekerja sosial dan kepala UPT yang padat, hingga akses dokumen internal yang terbatas. Selain itu, kondisi emosional sebagian klien yang tidak stabil dan potensi bias jawaban kuesioner turut menjadi tantangan tersendiri. Kendala-kendala ini diatasi melalui pendekatan personal, penjadwalan yang fleksibel, serta penjaminan kerahasiaan identitas responden agar data yang diperoleh tetap akurat.

Setelah dipaparkan analisis mendalam mengenai pelaksanaan kedelapan peran pekerja sosial secara terpisah, bagian ini menyajikan pembahasan terintegrasi yang merangkum keseluruhan temuan penelitian dalam satu kesatuan analisis komprehensif. Pembahasan ini bertujuan untuk melihat pola umum, keterkaitan antarperan, serta memberikan interpretasi yang lebih utuh mengenai bagaimana peran pekerja sosial dijalankan secara menyeluruh dalam pelayanan rehabilitasi sosial bagi eks PSK di UPT PPSKW Mattiro Deceng Makassar.

1. Deskripsi Kuantitatif (Data Asli dari Penelitian)

Tabel 2. Rekapitulasi Skor 8 Peran Pekerja Sosial di UPT PPSKW Mattiro Deceng Makassar

No	Peran Pekerja Sosial	Total Skor	Mean	Kategori
1	Enabler (Pemberdaya)	321	4,46	Sangat Sering
2	Broker (Penghubung)	325	4,45	Sangat Sering
3	Counselor (Konselor)	328	4,60	Sangat Sering
4	Mediator (Penengah Konflik)	318	4,42	Sangat Sering
5	Educator (Pendidik)	326	4,50	Sangat Sering
6	Advocate (Pembela)	300	4,20	Sering
7	Case Manager (Manajer Kasus)	325	4,40	Sangat Sering
8	Change Agent (Agen Perubahan)	320	4,40	Sangat Sering
	Rata-Rata Keseluruhan	2.563	4,43	Sangat Sering / Sangat Baik

Kategorisasi mengacu pada Sugiyono (2019): 4,21–5,00 Sangat Baik (Sangat Sering); 3,41–4,20 Baik (Sering)

Berdasarkan tabel 2, pekerja sosial di UPT PPSKW Mattiro Deceng Makassar secara keseluruhan telah menjalankan kedelapan perannya dengan sangat baik, dengan rata-rata mean 4,43 (kategori "Sangat Sering"). Peran konselor memperoleh skor tertinggi (4,60), sedangkan peran advokat memperoleh skor terendah (4,20), yang menunjukkan bahwa fungsi pemulihan psikososial lebih kuat dijalankan dibandingkan dengan fungsi advokasi hak klien.

2. Deskripsi kualitatif

Secara keseluruhan, kedelapan peran pekerja sosial di UPT PPSKW Mattiro Deceng telah dilaksanakan dengan sangat baik, dengan rata-rata 4,43. Peran konselor

memperoleh skor tertinggi (4,60), mencerminkan kuatnya fokus lembaga pada pemulihan psikologis eks PSK melalui konseling individual, kelompok, trauma, dan keluarga. Sebaliknya, peran advokat memperoleh skor terendah (4,20), terutama pada indikator pemenuhan hak penerima manfaat dalam lembaga (mean 3,9), yang mengindikasikan adanya dilema advokasi internal saat pekerja sosial harus menyeimbangkan loyalitas kelembagaan dengan pembelaan klien. Temuan ini menunjukkan bahwa dimensi psikososial-edukatif lebih kuat dijalankan dibandingkan dengan dimensi advokasi struktural.

3. Deskripsi Penulis

Berdasarkan keseluruhan temuan kuantitatif dan kualitatif yang telah dipaparkan, penulis menilai bahwa pekerja sosial di UPT PPSKW Mattiro Deceng Makassar telah menjalankan kedelapan peran profesionalnya secara konsisten dan bermakna, dengan kekuatan utama terletak pada relasi terapeutik (konseling) dan fungsi penghubung sumber daya (broker), sementara peran advokasi—khususnya advokasi internal terhadap kelembagaan sendiri—masih menjadi titik paling rentan dan memerlukan penguatan. Penulis memandang bahwa pola ini bukan kebetulan, melainkan mencerminkan budaya kerja lembaga yang lebih mengutamakan pendekatan suportif-pemulihan dibandingkan dengan pendekatan konfrontatif-struktural, sebuah pilihan yang dapat dipahami mengingat posisi pekerja sosial sebagai bagian dari sistem birokrasi yang sama dengan pihak yang sewaktu-waktu perlu mereka kritisi. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan posisi tawar (bargaining position) pekerja sosial fungsional agar peran advokasi tidak hanya bergantung pada keberanian individu, melainkan didukung oleh mekanisme kelembagaan yang jelas.

Pembahasan

Proses pengumpulan data dalam ranah rehabilitasi sosial kerap menghadapi hambatan kompleks yang bersumber dari kondisi psikologis subjek serta kendala teknis operasional. Keterbukaan informasi dari penerima manfaat cenderung tertutup akibat trauma masa lalu, rasa malu, serta kekhawatiran terhadap stigma negatif masyarakat sekitar. Kondisi emosional yang tidak stabil memerlukan pendekatan personal yang cermat melalui pembangunan relasi saling percaya sebelum wawancara mendalam dapat dilaksanakan. Di samping itu, peneliti juga harus berhadapan dengan keterbatasan akses terhadap dokumen internal kelembagaan serta padatnya jadwal kerja para staf ahli. Adanya potensi bias dalam pengisian instrumen survei mendorong perlunya jaminan kerahasiaan identitas responden guna menjaga validitas data empiris. Penyesuaian jadwal yang fleksibel serta penerapan etika penelitian yang ketat berhasil meminimalkan hambatan tersebut, sehingga data primer yang diperoleh tetap akurat dan komprehensif (Hermawan et al., 2024; Santillan et al., 2023; Thoyib et al., 2024).

Secara umum, pelaksanaan seluruh peran profesional pekerja sosial di lembaga rehabilitasi telah berjalan sangat optimal dengan fokus utama pada pemulihan kondisi mental. Tingginya capaian pada fungsi konseling mencerminkan komitmen lembaga dalam menerapkan prinsip pengayoman yang sensitif terhadap trauma bagi penerima manfaat. Sesi konsultasi tatap muka membantu mereduksi beban emosional akibat eksploitasi masa lalu, sekaligus menumbuhkan kembali resiliensi pribadi klien. Sebaliknya, pelaksanaan fungsi pembelaan hak mencatatkan skor paling rendah di antara dimensi intervensi lainnya. Fenomena ini mengindikasikan adanya dilema peran ganda saat pendidik sosial harus menyeimbangkan loyalitas terhadap birokrasi kelembagaan dengan pembelaan hak dasar penerima manfaat. Kondisi tersebut menegaskan bahwa dimensi pemulihan psikososial dan edukatif masih lebih



dominan dijalankan ketimbang tindakan pembelaan yang bersifat struktural di dalam lingkungan instansi (Haryadi, 2024; Subangun & Harjosoekarto, 2023; Suwandi et al., 2024)

Kemampuan pendidik sosial dalam menjembatani akses terhadap sumber daya eksternal dan sistem dukungan keluarga memegang peranan krusial dalam mempercepat proses reintegrasi sosial. Revaluasi hubungan kekeluargaan tidak hanya memulihkan ikatan emosional yang sempat terputus, tetapi juga menjadi strategi mitigasi guna mencegah klien kembali ke lingkungan yang berisiko. Di samping itu, pengintegrasian bimbingan keterampilan hidup serta pelatihan vokasional terbukti efektif dalam memfasilitasi kemandirian ekonomi penerima manfaat secara berkelanjutan. Sementara itu, penyelesaian konflik internal di dalam panti cenderung lebih mudah difasilitasi dibandingkan mediasi dengan pihak luar yang sering terhalang jarak dan stigma sosial. Keberhasilan skema manajemen kasus sangat ditentukan oleh koordinasi terpadu antara layanan kesehatan, bimbingan mental, serta pelatihan kerja. Sinergi antarperan ini membuktikan bahwa rehabilitasi yang efektif membutuhkan skema intervensi yang holistik dan berkesinambungan (Avelina et al., 2025; Satuhu et al., 2023; Wolfe et al., 2026).

Rendahnya skor pada aspek advokasi internal memperlihatkan keterbatasan ruang gerak pekerja sosial yang berada di bawah naungan struktur birokrasi pemerintahan. Keterikatan administratif sering kali membatasi keberanian individu untuk mengkritisi kebijakan kelembagaan yang kurang berpihak pada kepentingan terbaik penerima manfaat. Berbeda dengan praktisi di organisasi nonpemerintah yang lebih leluasa melakukan gerakan transformatif, pendidik sosial pemerintah cenderung memilih pendekatan suportif yang aman dari risiko konflik internal. Kondisi ini menunjukkan perlunya regulasi formal yang memberikan perlindungan hukum serta memperkuat *bargaining position* para pekerja sosial di lapangan. Tanpa adanya skema mekanisme kelembagaan yang jelas, upaya pembelaan hak-hak klien akan selalu bergantung pada keberanian personal individu. Oleh karena itu, penguatan landasan kebijakan mutlak diperlukan agar fungsi advokasi dapat berjalan sejajar dengan fungsi pemulihan mental (Carr et al., 2023; Funk et al., 2025; Silva et al., 2020)

Pola capaian antarindikator membuktikan bahwa kedelapan fungsi pekerjaan sosial saling bertautan erat dan membentuk satu kesatuan sistem intervensi yang tidak terpisahkan. Kendati demikian, dominasi pendekatan kuratif-individual mengindikasikan bahwa model rehabilitasi sosial yang diterapkan masih berfokus pada penyembuhan gejala permukaan alih-alih perubahan sistemik. Praktik pelayanan langsung secara konsisten mampu memulihkan kepercayaan diri dan keterampilan teknis penerima manfaat dalam jangka pendek. Namun, tanpa adanya dukungan advokasi struktural yang kuat, para lulusan rehabilitasi tetap rentan menghadapi diskriminasi ketika kembali ke tengah masyarakat. Evaluasi menyeluruh terhadap skema pelayanan ini menekankan pentingnya pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih transformatif. Pembaharuan tata kelola rehabilitasi harus diseimbangkan antara penguatan kapasitas pribadi klien dengan pembenahan ekosistem lingkungan sosial, sehingga proses pembauran kembali dapat berlangsung secara optimal.

KESIMPULAN

Praktik pekerja sosial dalam pelayanan rehabilitasi sosial bagi mantan pekerja seks komersial terbukti berjalan sangat optimal melalui pengintegrasian delapan fungsi profesional. Pendampingan psikososial melalui peran *counselor* dan *educator* menjadi dimensi paling dominan yang berfokus pada pemulihan trauma mental, pembentukan resiliensi emosional, serta penguatan keterampilan kerja penerima manfaat. Keberhasilan intervensi ini didukung



pula oleh efektivitas fungsi *enabler*, *broker*, *mediator*, *case manager*, dan *change agent* dalam memfasilitasi reintegrasi sosial serta memulihkan hubungan kekeluargaan. Namun, pelaksanaan fungsi *advocate* mencatatkan capaian terendah akibat dilema birokrasi internal dalam pembelaan hak-hak klien. Secara keseluruhan, integrasi seluruh peran profesional tersebut berhasil mentransformasi kemandirian pribadi dan keberfungsian sosial para mantan pekerja seks komersial ke tengah masyarakat.

Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan posisi tawar pekerja sosial dalam struktur birokrasi pemerintah agar fungsi pembelaan hak klien dapat berjalan seimbang dengan pemulihan psikologis. Hasil kajian ini menjadi acuan praktis bagi pengelola lembaga rehabilitasi untuk memperkuat skema pendampingan pascarehabilitasi dan memperluas kemitraan dengan sektor kerja formal. Namun, karena penelitian ini berfokus pada satu unit pelaksana teknis pemerintah daerah dengan pendekatan *mixed methods*, temuan yang diperoleh belum mencakup dinamika rehabilitasi sosial berbasis komunitas nonpemerintah. Oleh karena itu, penelitian di masa depan disarankan untuk menerapkan metode *longitudinal study* guna melacak retensi kemandirian ekonomi penerima manfaat, serta mengeksplorasi efektivitas intervensi sosial lintas lembaga dalam mereduksi stigma komunal masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ati, N. U. (2022). The collaboration model of stakeholders perspective implementation of prostitutional prevention and handling policy. *Khazanah Sosial*, 4(2), 391–400. <https://doi.org/10.15575/ks.v4i2.17849>
- Avelina, Y., Hermisih, A. R., Silva, G. C. K. D. D., May, M., Rian, O. N., & Tokan, H. I. (2025). Sinergi rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi keluarga penyintas ODGJ melalui platform digital. *GEMAKES: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 398–412. <https://doi.org/10.36082/gemakes.v5i3.2716>
- Bajpai, P., Sharma, S., Sony, K. K., Pandey, S., & Vanzara, T. (2025). Autonomy and self-acceptance among rescued female sex workers: A systematic review on perceived well-being. *Annals of Neurosciences*, 32(1), 45–56. <https://doi.org/10.1177/09727531251384717>
- Carr, E. R., Davenport, K. M., Murakami-Brundage, J., Robertson, S. A., Miller, R., & Snyder, J. (2023). From the medical model to the recovery model: Psychologists engaging in advocacy and social justice action agendas in public mental health. *American Journal of Orthopsychiatry*, 93(2), 120–130. <https://doi.org/10.1037/ort0000656>
- Chaidar, M., Kusnadi, S. A., Alfadani, A. Z., & Lystiadi, I. P. (2025). Pemodelan rehabilitasi sosial pada pecandu narkoba. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 408–419. <https://doi.org/10.24269/lis.v9i2.11577>
- Fadlia, F., Ramadani, I., & Zalikha, S. N. (2021). Women friendly mosque in Banda Aceh: A study of the concept of gender justice and gender planning perspective. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 16(1), 101–120. <https://doi.org/10.21580/sa.v16i1.6330>
- Funk, M., Drew, N., Cole, C., McGovern, P., & Moro, M. F. (2025). A new WHO roadmap for mental health policy reform. *World Psychiatry*, 24(3), 441–442. <https://doi.org/10.1002/wps.21360>
- Guo, F. (2025). Research on social governance strategies related to public health risks of sex trading. *Transactions on Social Science Education and Humanities Research*, 14, 349–355. <https://doi.org/10.62051/tnc4f570>



- Haryadi, A. P. (2024). *Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam penyelesaian sengketa internal organisasi kemasyarakatan* (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan). Universitas Lampung.
- Hermawan, A., Guntoro, B., & Sulhan, M. (2024). Community engagement for disaster preparedness in rural areas of Mount Merapi, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(4), 1505–1518. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190427>
- Indonesia, U., Tawakal, M. I., & Imelda, J. D. (2022). Transformation of prostitution services and stigma against prostitutes (WTS). *Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 12(2), 117–131. <https://doi.org/10.31940/soshum.v12i2.117-131>
- Mela, A., & Tousi, E. (2023). Safe and inclusive urban public spaces: A gendered perspective. The case of Attica's public spaces during the COVID-19 pandemic in Greece. *Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering*, 33(2), 5–14. <https://doi.org/10.5755/j01.sace.33.2.33575>
- Nattabi, J., Bahar, O. S., Nabayinda, J., Nabunya, P., Kiyangi, J., Kizito, S., Namuwonge, F., Nsubuga, E., Witte, S. S., & Ssewamala, F. M. (2024). Crossroads of choice: A qualitative study of the factors influencing decisions to transition from sex work among women engaged in sex work in Southern Uganda. *Research Square*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4468785/v1>
- Nurhaliza, R. D. (2025). *Peran pekerja sosial dalam mengatasi trauma anak disabilitas korban pelecehan seksual di Dinas Sosial Kota Bandung* (Tesis tidak diterbitkan). Indian Institute of Science Bangalore.
- Palar, R. G. (2025). *The dynamics of mental health among female sex workers who live openly within the local community* (Tesis Magister tidak diterbitkan). Universitas Kristen Satya Wacana.
- Pratiwi, V. (2023). Dominasi dan bentuk-bentuk relasi kuasa dalam prostitusi. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(2), 261–275. <https://doi.org/10.14710/endogami.6.2.261-275>
- Rahmah, S., Beridiansyah, B., Hafni, I., Jubir, J., & Fajri, N. (2024). The effectiveness of rehabilitation as an effort to address narcotics issues. *Andalas Law Journal*, 9(2), 64–78. <https://doi.org/10.25077/alj.v9i2.98>
- Santillan, E. G., Santillan, E. T., Doringo, J. B., Pigao, K. J. F., & Mesina, V. F. C. (2023). Assessing the impact of a hybrid work model on job execution, work-life balance, and employee satisfaction in a technology company. *Journal of Business and Management Studies*, 5(6), 13–38. <https://doi.org/10.32996/jbms.2023.5.6.2>
- Satuhu, N. R., Juniarti, N., & Widiarti, E. (2023). Rehabilitasi mental berbasis komunitas terhadap kualitas hidup ODGJ. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 6(2), 1389–1399. <https://doi.org/10.31539/jks.v6i2.5429>
- Silva, A. G. da, Baldaçara, L., Cavalcante, D., Fasanella, N. A., & Palha, A. P. (2020). The impact of mental illness stigma on psychiatric emergencies. *Frontiers in Psychiatry*, 11, Artikel 573. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.00573>
- Slim, M., Haddad, C., Sfeir, E., Rahme, C., Hallit, S., & Obeid, S. (2020). Factors influencing women's sex work in a Lebanese sample: Results of a case-control study. *BMC Women's Health*, 20(1), Artikel 193. <https://doi.org/10.1186/s12905-020-01062-x>



- Subangun, M. I., & Harjosoekarto, S. (2023). Isomorfisme institusional LPSK dalam penegakan hak rehabilitasi psikososial korban tindak pidana di Indonesia. *Jurnal HAM*, 14(1), 39–54. <https://doi.org/10.30604/ham.2023.14.39-54>
- Suwandi, A. F., Yanti, R. A. A., & Librianti, E. O. I. (2024). Perspektif hukum administrasi terhadap budaya organisasi dalam pembangunan hukum. *Siyasah: Jurnal Hukum Tatanegara*, 4(2), 215–229. <https://doi.org/10.32332/z23bzw30>
- Teske, J., Kugel, J., Javaherian-Dysinger, H., Krpalek, D., & Salamat, A. (2023). Exploring the impact of an occupational therapy program for former sex workers: A mixed methods pilot study. *Occupational Therapy in Mental Health*, 40(2), 138–162. <https://doi.org/10.1080/0164212x.2023.2237188>
- Thoyib, M., Degaf, A., Fatah, A. A., & Huda, M. (2024). Religious tolerance among Indonesian Islamic university students: The pesantren connection. *Journal of Al-Tamaddun*, 19(2), 239–250. <https://doi.org/10.22452/jat.vol19no2.16>
- Wolfe, R. M., Speakar, B., Pham, M., Lorenz, T. K., & Spaulding, W. (2026). The past and future of integrated biopsychosocial whole-health perspectives in psychiatric rehabilitation. *Psychiatric Rehabilitation Journal*, 49(1), 66–78. <https://doi.org/10.1037/prj0000682>